

### **BAB III**

## **COMMUNITY OF COMMON DESTINY SEBAGAI KEBIJAKAN LUAR NEGERI CHINA PADA ERA XI JINPING**

Bab ini akan menjelaskan tentang arah, prinsip, dan kebijakan dalam politik luar negeri Xi Jinping secara lebih rinci. Kemudian, bab ini juga akan menjelaskan tentang artikulasi sosialisme dengan karakteristik China dalam kebijakan luar negerinya seperti *community of common destiny*. Lebih khusus akan membahas gagasan utama termasuk determinan-determinan dalam perumusan *community of common destiny* sebagai kebijakan luar negeri China di era Xi Jinping.

#### **A. Politik Luar Negeri China Era Xi Jinping**

Sebelum menjabat sebagai Presiden China, Xi Jinping telah menjadi pejabat penting dalam pemerintahan China. Pada periode kedua kepemimpinan Hu Jintao tahun 2007, ia termasuk dalam Politburo<sup>4</sup> bersama dengan Li Keqiang, He Guoqing, dan Zhou Yongkang (Wicaksono, 2017: 657). Kemudian tujuh bulan setelahnya, ia dilantik menjadi Wakil Presiden China pada tahun 2008. Barulah pada Kongres Nasional Partai Komunis China ke-18 tahun 2013, Xi Jinping dilantik sebagai presiden menggantikan Hu Jintao.

Xi Jinping menjadi presiden China selama dua periode dari tahun 2013 hingga tahun 2022. Selama kurun waktu dua periode, Xi Jinping memiliki tujuan utama yaitu mengembalikan kejayaan China sebagai “Mimpi China” melalui “Kebangkitan Besar Bangsa China”. Dalam menjalankan roda pemerintahan baik dalam

---

<sup>4</sup> Politburo merupakan singkatan dari Komite Pusat Partai Komunis dalam bahasa Rusia. Politburo menjadi penentu kebijakan partai dan China secara umum. Inti dari Politburo adalah Biro Politik yang beranggotakan 12-24 orang.

maupun luar negeri, Xi Jinping masih berpegangan erat pada prinsip sosialisme dengan karakteristik China yang dipopulerkan oleh pemerintahan Deng Xiaoping (*The Dipomat*, “*Not Rising, But Rejuvenating: The Chinese Dream*”, 05 Februari 2013). Setiap pemimpin China memiliki visi yang sama untuk kebangkitan besar bangsa China dari Ciang kaishek, Jiang Zemin, hingga Hu Jintao.

Secara garis besar, Mimpi China memiliki empat bagian yaitu China yang kuat, China yang beradab, China yang harmonis, dan China yang indah. China yang kuat memiliki indikator pada aspek ekonomi, politik, diplomatik, ilmu pengetahuan, dan militer. Sementara China yang beradab berkiblat pada terpenuhinya keadilan dan kesetaraan, budaya yang kaya, dan moral yang tinggi. Hal ini menekankan pada keberadaban China pada masa kuno. Hubungan baik antar kelas sosial menjadi indikator tercapainya China yang harmonis. Kemudian China yang indah diindikasikan dengan tercapainya lingkungan sehat dan polusi yang rendah (*New York Times*, “*Xi Jinping’s Chinese Dream*”, 04 Juni 2013).

Mimpi China untuk mencapai kekuatan ekonomi dituangkan dalam “Tujuan 200 tahun” yang dibagi menjadi dua periode 100 tahunan. Periode pertama berfokus terhadap pencapaian “masyarakat yang sejahtera” pada tahun 2021, tepat peringatan 100 tahun berdirinya Partai Komunis China sejak tahun 1921. “Masyarakat yang sejahtera” digambarkan sebagai pencapaian standar kehidupan yang tinggi dengan melipatgandakan Produk Domestik Bruto (PDB) dan pendapatan per kapita tahun 2010 mencapai sekitar 11.400 dolar Amerika Serikat per kepala pada tahun 2020. Kemudian, proyek lainnya adalah menyelesaikan urbanisasi menjadi sekitar satu miliar orang pada tahun 2030, atau 70 % dari populasi China saat ini. Sementara periode kedua berfokus pada “modernisasi” yang bertujuan untuk menjadikan China sepenuhnya berkembang pada tahun 2049, tepat peringatan 100 tahun

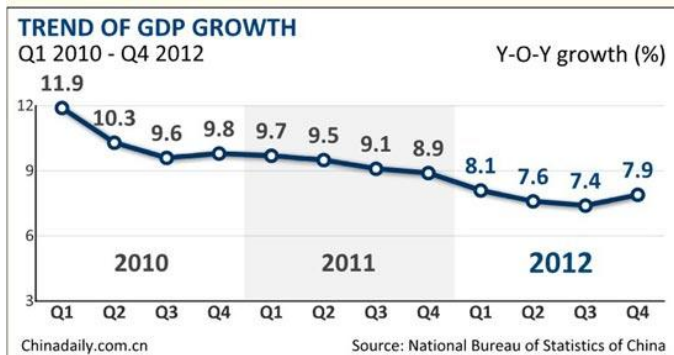
berdirinya Republik Rakyat China sejak tahun 1949. “Modernisasi” digambarkan dengan China mendapatkan kembali posisinya sebagai pemimpin dunia dalam sains dan teknologi serta ekonomi dan bisnis, kebangkitan peradaban China, budaya dan militer, dan China berpartisipasi aktif di semua bidang usaha (New York Times, “*Xi Jinping’s Chinese Dream*”, 04 Juni 2013). Di bidang ekonomi, periode kedua bertujuan untuk meningkatkan PDB per kapita negara sedang berkembang mencapai sekitar 55.500 pada tahun 2049 (Ding, 2015).

Kebijakan tersebut didukung oleh Pemimpin Partai Komunis Rusia Gennady Zyuganov. Ia mengatakan bahwa China pasti akan mencapai tujuan dua ratus tahun tersebut dan segala prestasi China dicapai oleh kebijakana negara yang masih berpegang pada sosialisme. Ia juga menambahkan bahwa, “Tidak ada keraguan bahwa pada tahun 2049 sebuah dasar material dan teknis akan dibuat di China untuk membangun masyarakat sosialis modern”. Sedangkan untuk demokrasi bergaya Barat, Zyuganov mengatakan bahwa sistem pemerintahan demokrasi Barat belum tentu sesuai dengan semua negara. China telah memiliki model pembangunan demokrasinya sendiri yang paling sesuai untuk memenuhi pembangunan negara tersebut. Ia menambahkan bahwa, “Pilihan ini telah terbukti lebih dari sekedar sukses, yang merupakan bukti terbaik dari efektivitas sistem politik China di bawah kepemimpinan Partai Komunis China” (New China, “*Interview: China can realize "two centenary goals": Russia's Communist leader*”, 22 Oktober 2017).

Sementara itu, untuk mencapai tujuan dua ratus tahun, China harus mempertahankan tingkat pertumbuhan tahunan PDB per kapita setidaknya 5,9% sampai tahun 2021 dan 5,8% sampai tahun 2049. Dengan perkiran tingkat pertumbuhan populasi rata-rata, dapat mengindikasikan tingkat pertumbuhan tahunan dari total PDB di atas 6,3 % sampai tahun 2021 dan lebih dari 5,6 % sampai tahun 2049 (Ding, 2015). Namun tujuan itu

menghadapi tantangan serius dengan ekonomi yang melambat dan tingkat pertumbuhan tahunan yang menurun.

**Tabel 3.1 Tren Pertumbuhan GDP China**



*Sumber: Chinadaily.com.cn, "China's GDP Growth Eases to 7,8 % in 2012", 18 Januari 2013*

Pertumbuhan tahunan PDB semakin menurun dari tahun 2010 mencapai rata-rata 10,4 % menjadi rata-rata 7,8 % pada tahun 2012. Pada kuartal keempat tahun 2012, pertumbuhan PDB China mengalami kenaikan menjadi 7,9 % dari tujuh kuartal berturut-turut mengalami penurunan. Kenaikan tersebut dipicu oleh melesatnya perdagangan China di luar negeri, yang menjadi penyokong utama pertumbuhan ekonomi China (Chinadaily.com.cn, "China's GDP Growth Eases to 7,8 % in 2012", 18 Januari 2013).

Kenaikan PDB China pada tahun 2012 hanya sesaat, pada tahun 2013 pertumbuhan PDB kembali mengalami penurunan mencapai 7,7 %, dan terus menurun pada tahun 2014 mencapai 7,3 % (Reuters "China's 2014 Economic Growth Misses Target, Hits 24-year Low", 20 Januari 2015). Analisis data historis menunjukkan risiko tinggi terhadap penurunan substansial dalam pertumbuhan China di tahun-tahun mendatang. Perubahan demografis dan struktural dalam ekonomi

menjadi faktor utama menurunnya pertumbuhan ekonomi selama tiga dekade terakhir (Ding, 2015).

Kebijakan ekonomi Xi Jinping “New Normal” dengan menurunkan target pertumbuhan PDB telah menjadi faktor utama penurunan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan tersebut merepresentasikan komitmen China untuk menyukseskan agenda *green economy*. Setelah 30 tahun pertumbuhan ekonomi dua digit yang mengangkat jutaan orang China keluar dari kemiskinan, China ingin mengubah strategi dengan mengedepankan pembangunan berkualitas tinggi dan berkelanjutan. Pertumbuhan pesat yang terjadi 30 tahun telah merusak lingkungan dan menyisakan polusi udara yang tidak sehat.

Kepala Ekonom Industrial Bank di Shanghai Lu Shengwei berkomentar terhadap kebijakan China tersebut. Ia mengatakan bahwa “Jika China tidak mengambil kebijakan tersebut, China akan menghadapi masalah besar di masa depan. Tetapi jika China mengambil langkah itu sekarang, China tidak akan mendapatkan kembali kejayaannya besok”. Tujuan dari kebijakan tersebut bukan hanya *green economy*, tetapi juga mempromosikan konsumsi domestik dengan mengorbankan investasi dan ekspor (Brødsgaard & Rutten, 2017).

Data dari Biro Statistik Nasional menunjukkan bahwa ekonomi China sebanyak 56,9 triliun yuan masih sangat bergantung pada investasi untuk pertumbuhan. Sehingga, kebijakan tersebut secara tidak langsung berimplikasi pada penurunan pertumbuhan PDB negara. Namun, Kepala Biro Statistik China Ma Jiantang percaya bahwa pada tahun 2014, reformasi akan terus menjadi kekuatan pendorong utama pertumbuhan ekonomi. Kemudian, Kepala Ekonom China di IHS Global Insight Brian Jackson juga mengatakan bahwa “Secara keseluruhan, ekonomi China berjalan dengan baik melalui tahap penyesuaian. Kekhawatiran bahwa China mungkin mengorbankan terlalu banyak pertumbuhan dalam

upaya untuk memberlakukan perubahan juga tidak berdasar” (Yao & Wang, Reuters, “*China's 2013 Economic Growth Dodges 14-year Low But Further Slowing Seen*”, 20 Januari 2014).

Pada pertengahan tahun 2014, sebanyak 8000 artikel menulis tentang Mimpi China. Mimpi China ditafsirkan sebagai pengembalian masa kejayaan China dari “Abad penghinaan nasional” saat Perang Opium Pertama tahun 1839-1842 dan perang Sino-Jepang 1945. Masa-masa tersebut mengingatkan China akan penyerangan, intimidasi, dan perpecahan oleh imperialis yang berfungsi sebagai fondasi bagi identitas dan tujuan modern. Peperangan tersebut menghadapkan China pada krisis dalam negeri, dari politik hingga ekonomi sehingga menyebabkan revolusi yang semakin mengikis tradisi China sebagai bangsa yang beradab (The Dipomat, “*Not Rising, But Rejuvenating: The Chinese Dream*”, 05 Februari 2013).

China perlu mengartikulasikan Mimpi China kepada dunia internasional agar tidak terjadi kesalahan interpretasi. Gagasan utama dari Mimpi China adalah pengembalian kejayaan China pada masa kuno yang penuh tradisi dan budaya China serta ekonomi yang stabil, bukan proyek hegemoni dalam bentuk lain. China menegaskan dalam prinsip politik luar negerinya, bahwa China tidak akan mendominasi atau didominasi oleh negara lain. Sehingga, konsep Kebangkitan Besar Bangsa China dipilih sebagai artikulasi dari Mimpi China.

Dalam beberapa pertemuan luar negeri, China selalu menekankan Kebangkitan Besar Bangsa China dan Mimpi China kepada dunia internasional. Seperti saat ia menghadiri *Special China-ASEAN Foreign Ministers' Meeting* tahun 2013, *Confidence-Building Measures in Asia* (CICA) tahun 2014, *the 22nd APEC Economic Leaders' Meeting* tahun 2014, *Boao Forum for Asia Annual Conference* tahun 2015 dan *Imperial Springs International Forum* tahun 2017. Xi Jinping

mengkampanyekan Mimpi China dan Kebangkitan Besar Bangsa China melalui forum-forum tersebut.

Kebangkitan Besar Bangsa China, atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan sebutan *the Great Rejuvenation of China Nation*, memiliki dimensi berbeda-beda dari bidang politik, ekonomi, dan masyarakat China itu sendiri. Pada bidang politik, Xi Jinping menekankan peran partai dalam pemerintahan China, serta pemulihan partai dari korupsi dan penguatan moralitas pejabat politik partai. Sementara itu, dalam bidang ekonomi, Xi Jinping melanjutkan kebijakan Deng Xiaoping yaitu reformasi mendalam dan keterbukaan ekonomi. Xi Jinping menganggap bahwa kebijakan tersebut masih relevan dan perlu untuk dilanjutkan agar mencapai tujuan China menjadi negara ekonomi terbesar pertama di dunia mengalahkan Amerika Serikat (BBC News, “*The Credo: Great Rejuvenation of Chinese Nation*”, 07 November 2014). Sedangkan kebangkitan nasional dari dalam masyarakat China bermaksud untuk meningkatkan patriotisme masyarakat China pada pemerintahan Partai Komunis China (Wicaksono, 2017). Ia menekankan bahwa China akan menerapkan patriotisme dalam negeri, dan globalisasi untuk luar negeri (The Dipomat, “*Not Rising, But Rejuvenating: The Chinese Dream*”, 05 Februari 2013). China mendapat keuntungan lebih banyak dari globalisasi dan keterbukaan ekonomi. Xi mengatakan bahwa PKC telah mengangkat lebih dari 700 juta orang dari kemiskinan sebagai hasil dari implementasi kebijakan reformasi dan keterbukaan di akhir tahun 1970an. Sampai sekarang populasi kemiskinan terus menurun.

Di sebuah forum untuk para penulis dan seniman pada bulan Oktober 2013, Xi Jinping mengatakan bahwa pemerintahan China akan melihat kembali sejarah China dan budaya mandarin untuk diimplementasikan dalam negara. Seperti yang ia katakan bahwa, “China akan memulihkan hal-hal baru dari sejarah dan budaya China

sehingga memiliki kekuatan kohesif dan pengaruh yang lebih besar di benak masyarakat China”. Xi mengutip pemikiran dari Konfusius dan tokoh lainnya untuk mengembalikan budaya kaisar dalam bentuk otokrasi demi memperkuat legitimasi pemerintahan otoriternya. Aspek politik pada kepemimpinan Xi Jinping adalah kultus kepribadian, kebangsaan dan kembali ke masa lalu China untuk membentuk masa depan (BBC News, “*The Credo: Great Rejuvenation of Chinese Nation*”, 07 November 2014).

Dalam sistem pemerintahannya, Xi menentukan kebijakan secara mandiri tanpa intervensi dari pihak lain. Hal tersebut berbeda dengan Hu Jintao yang mengedepankan konsensus dan kepemimpinan bersama. Kepemimpinan Xi Jinping ditandai dengan dibentuknya “kelompok kepemimpinan kecil” untuk menangani bidang-bidang tertentu seperti keamanan, *cyber*, reformasi militer, finansial dan sebagainya, dimana Xi sebagai ketuanya secara langsung (Wicaksono, 2017: 659). Xi Jinping juga menekankan bahwa China tidak didikte oleh negara manapun. China bertumpu pada teori, sistem, jalur, dan nilai-nilai China sendiri, juga tidak mendominasi atau mencari hegemoni.

Prinsip-prinsip kebijakan luar negeri China masih mengadaptasi dari prioritas kebijakan luar negeri pada akhir tahun 1970-an, yakni:

- 1) Secara keseluruhan harus mempertahankan lingkungan eksternal yang bersahabat agar tetap kondusif untuk pembangunan ekonomi perdamaian jangka panjang.
- 2) Promosi pola hubungan antarnegara yang lebih kooperatif dan kolaboratif (saling menguntungkan) dan penekanan pada peningkatan hubungan China dengan negara-negara tetangga berdasarkan “persahabatan, kesetaraan, ketulusan, timbal balik, dan inklusivitas.”



- 3) Oposisi terhadap era Perang Dingin yang bertentangan, kebijakan dan pemikiran *zero-sum*, ekspansionisme, hegemonisme, dan politik kekuasaan.
- 4) Promosi pola kerjasama keamanan yang “komprehensif, bersama, dan kooperatif” untuk Asia dan dunia.
- 5) Sikap militer defensif terhadap dunia luar yang menghindari perlombaan senjata dan ancaman militer terhadap negara lain.
- 6) Menghormati sistem sosial dan jalur pembangunan yang berbeda, serta tidak saling mencampuri urusan internal negara lain.
- 7) Pertahanan tegas terhadap kedaulatan, integritas teritorial, keamanan, dan kepentingan pembangunan China.
- 8) Penyelesaian perselisihan secara damai antarnegara melalui dialog dan konsultasi.
- 9) Dukungan untuk menciptakan tatanan internasional yang lebih adil dan setara dalam konteks umum rezim global dan regional yang ada
- 10) Komitmen untuk memperdalam reformasi ekonomi, sebagian melalui memperluas keterlibatan China dalam sistem internasional dan “ekonomi dunia terbuka” (Swaine, 2015).

Sementara itu, Xi Jinping menambahkan beberapa elemen dalam politik luar negerinya yang lebih rinci, sebagai berikut:

- 1) Rutin dan konsisten dalam pembangunan perdamaian dan stabilitas dengan menegaskan pertahanan terhadap kepentingan inti China, berpusat pada kedaulatan dan integritas teritorial, keamanan, dan pembangunan.
- 2) Penekanan yang disempurnakan untuk meyakinkan negara lain bahwa China “tidak pernah memenuhi pembangunan dengan mengorbankan kepentingan negara lain”.

- 3) Pengungkapan tujuan pembangunan jangka menengah dan jangka panjang tertentu (Tujuan Dua Ratus Tahun terkait dengan konsep baru Mimpi China, semua diarahkan untuk mencapai tujuan lama yaitu menciptakan China yang kuat dan kaya dalam damai dengan kekuatan luar.
- 4) Terciptanya lembaga ekonomi dan keuangan internasional baru (dan terutama Asia) seperti *Asian Infrastructure Investment Bank* (AIIB) dan *Silk Road Fund*.
- 5) Pengungkapan strategi baru untuk pembangunan ekonomi lintas benua berskala besar: konsep *One Belt, One Road* yang menghubungkan China dan Pasifik dengan Eropa dan wilayah Baltik melalui jalur darat dan laut.
- 6) Penekanan kuat pada peran utama Perserikatan Bangsa-Bangsa di wilayah tertentu, termasuk keamanan *cyber* dan kontraterorisme.
- 7) Dukungan hubungan kooperatif di antara kekuatan besar melalui penerapan konsep baru: “Model Baru Hubungan Negara-negara Besar”.
- 8) Penolakan yang jelas dan tegas terhadap gagasan bahwa suatu negara (mungkin termasuk China) dapat berfungsi sebagai model pembangunan bagi negara lain (Swaine, 2015).

Secara umum, inovasi dan penambahan kebijakan luar negeri China merefleksikan pendekatan Xi Jinping yang lebih proaktif dan tegas dalam peran China di dunia dan dalam kawasan Asia Pasifik secara khusus. Sedangkan, kebijakan diplomasi China didasarkan pada prinsip “biaya rendah, resiko rendah, dan keuntungan yang tinggi”, sementara filosofi diplomasi China menekankan bahwa “kedamaian adalah hal yang paling berharga” dan “sekuat apapun sebuah negara yang suka berperang, pasti akan hancur juga”. Dalam mencapai kepentingannya, China menggunakan pendekatan diplomatik berdasarkan “kemurahan hati akan

memberikan keuntungan yang lebih besar”. Itulah sebabnya China mendekati negara-negara berkembang dan menawarkan kerjasama tanpa syarat-syarat tertentu seperti Amerika Serikat (Wicaksono, 2017). Diplomasi China terhadap negara-negara berkembang untuk membentuk interkoneksi dengan tujuan *community of common destiny* dikenal dengan diplomasi perifer (China US Focus, “*China’s Peripheral Diplomacy for Community of Common Destiny*”, 12 November 2013).

Pada saat Kongres Partai, Xi Jinping mengatakan bahwa ia akan berkomitmen untuk menjangkau seluruh dunia untuk membawa China kedalam periode baru yang penting. Ia menegaskan, “*No country can alone adress the many challenges facing mankind. No country can afford to retreat into self-isolation*”. Beberapa ahli menganggap pernyataan tersebut sebagai jawaban tidak langsung terhadap kebijakan “America First” Presiden Amerika Serikat Donald Trump (VOA Learning English, “*Trump in China: How Does America Fit into Xi’s Chinese Dream?*”, 07 November 2017).

Salah satu contoh kebijakan tersebut adalah keputusan Trump awal tahun 2017 untuk menarik Amerika Serikat dari Kesepakatan Paris 2015 tentang perubahan iklim. Trump mengatakan bahwa kesepakatan tersebut akan berdampak negatif pada ekonomi dan pekerja Amerika Serikat. Banyak negara yang mengkritik langkah Amerika Serikat tersebut. Sejak itu, Presiden Xi telah menyuarakan dukungan untuk kesepakatan Paris. China telah mengambil langkah-langkah untuk mencapai tujuan anti-polusinya. China juga sedang berusaha untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan meningkatkan penggunaan sumber energi terbarukan.

Seorang Senior East-West Center di Honolulu Denny Roy mengatakan bahwa Xi Jinping juga telah membangun kendali China lebih dekat ke rumah. Ia mengatakan, “Negara-negara yang berada di dekat China tunduk ke China. Mereka tidak membuat kebijakan luar

negeri yang bertentangan dengan tujuan China, yang juga akan membantu membangun China sebagai negara unggulan di kawasan, yang menurut saya adalah tujuan orang-orang China untuk waktu yang lama”. Contoh lain kebijakan luar negeri China adalah proyek “One Belt and One Road (OBOR)”. Proposal tersebut berusaha menghubungkan China melalui darat dan laut ke wilayah lain di Asia, Afrika dan Eropa. China telah menginvestasikan miliaran dolar di negara-negara yang terlibat dalam proyek tersebut. Roy mengatakan bahwa proyek OBOR merupakan tujuan jangka panjang China untuk menghubungkan negara-negara berkembang ke dalam satu komunitas bersama (VOA Learning English, “*Trump in China: How Does America Fit into Xi’s Chinese Dream?*”, 07 November 2017).

## **B. Gagasan Utama *Community of Common Destiny***

Pada dasarnya, *community of common destiny* adalah kebijakan yang bertujuan untuk memastikan perdamaian dan stabilitas di lingkungan strategis eksternal China melalui pengembangan hubungan baik dengan negara-negara tetangga (Rigby & Taylor, 2015: 60). Ide utamanya adalah menciptakan sinergitas hubungan positif antarnegara, khususnya negara-negara berkembang melalui prinsip sosialisme dengan karakteristik China. Berkaca pada prinsip pemerintahan Mao Zedong, Xi Jinping mengambil langkah yang sama yaitu menguatkan hubungan China dengan negara-negara Dunia Ketiga, atau yang sekarang disebut sebagai negara berkembang.

Tang Qifang, seorang peneliti dari *China Institute of International Studies*, menyatakan bahwa konsep *community of common destiny* melampaui segala macam perbedaan dalam masyarakat dan menargetkan kemungkinan keuntungan terbesar untuk semua orang. Pada 18 Januari 2017 di kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Jenewa, Presiden Xi Jinping akan menyampaikan pidato utama untuk membangun

*community of common destiny*. China menegaskan kembali komitmennya untuk menciptakan “one home for all”, sebagaimana yang ia sebutkan dalam pidato tahun baru 2017. Tang menambahkan bahwa gagasan tersebut lahir dari perubahan kondisi dunia dan perwujudan aspirasi China untuk berkomitmen dalam pembangunan dunia (En.people.cn, “*Xi’s World Vision: A Community of Common Destiny, A Shared Home for Humanity*”, 15 Januari 2017).

*Community of common destiny* merupakan interpretasi dari keinginan China beberapa ribu tahun yang lalu, bahwa manusia hidup bersama dalam masyarakat yang harmonis dan memperlakukan satu sama lain selayaknya keluarga. Xi Jinping mengeluarkan kebijakan tersebut sebagai komitmen China untuk menjaga perdamaian dunia. Tujuan dari *community of common destiny* adalah menciptakan kerjasama yang saling menguntungkan atau China biasa menyebutnya sebagai *win win cooperation*, serta kesetaraan, antarnegara dengan prinsip *common destiny under heaven*, dan perwujudan pola hubungan internasional baru China. Ide tersebut menyadarkan negara akan pentingnya menjalin hubungan positif yang didasarkan pada aspek-aspek ideasional bukan pada aspek material semata. Pendekatan tersebut akan memperoleh hasil yang lebih mengikat secara normatif. China kemudian menghidupkan kembali *One Belt and One Road* (OBOR) untuk menghubungkan negara-negara di dunia.

*Community of common destiny* telah dijalankan antara China dan negara-negara ASEAN untuk menjaga perdamaian dan pembangunan. Tahun 2013 menandai ulang tahun ke-10 pembentukan kemitraan strategis China-ASEAN. Perdana Menteri Li Keqiang akan menghadiri pertemuan pemimpin Asia Timur di Brunei dari tanggal 9 sampai 10 Oktober, di antaranya sorotan akan menjadi pertemuan pemimpin ASEAN-China ke-16.

### **C. Determinan Perumusan *Community of Common Destiny* sebagai Kebijakan Luar Negeri pada Pemerintahan Xi Jinping**

*Community of common destiny* memiliki tujuan yang untuk mencapai keterikatan secara kultural dan berimplikasi pada kerjasama jangka panjang. Berdasarkan prinsip sosialisme dengan karakteristik China, tujuan akhir dari *community of common destiny* adalah membuat semua negara saling terhubung satu sama lain. Negara-negara akan berbagi tanggungjawab atas segala problematika di dunia internasional, mulai dari isu politik rendah (seperti lingkungan, udara, kemiskinan, ekonomi, dan lainnya) hingga isu politik tinggi (seperti perang, konflik, HAM, dan lain-lain).

Dalam merumuskan *community of common destiny* sebagai kebijakan luar negeri, China mempertimbangkan beberapa aspek yang menjadi determinan penting yang berasal dari domestik maupun tekanan internasional. Beberapa determinan erat kaitannya satu sama lain. Lebih rinci akan dijelaskan di bawah ini.

#### **1. Media integrasi nilai dan kepentingan di kawasan Asia Pasifik**

*Community of common destiny* mengusung empat prinsip utama yaitu hubungan baik, ketulusan, saling menguntungkan, dan inklusivitas (Rigby & Taylor, 2015). Xi Jinping percaya bahwa hubungan baik akan berdampak pada kerjasama jangka panjang yang terjalin antarnegara. Ekuualitas dan saling menghargai dalam hubungan antarnegara merupakan fondasi kerjasama bilateral China dan negara-negara tetangga. Untuk menjaga hubungan baik, maka kunjungan antarnegara menjadi salah satu cara yang harus dilakukan. Hubungan baik dalam konsep *community of common destiny* ditandai dengan kedekatan geografis dan kedekatan historis.

Dari segi kedekatan geografis, China memiliki jumlah perbatasan darat terbesar dengan 14 negara, yaitu Korea Utara, Rusia, Mongolia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Afghanistan, Pakistan, India, Nepal, Bhutan, Myanmar, Laos dan Vietnam. Oleh sebab itu, negara-negara tersebut menjadi pertimbangan China dalam menentukan kebijakan politik luar negerinya. Perbatasan China telah mengalami perubahan berkali-kali selama berabad-abad. Hal itu berimplikasi pada hubungan China dengan negara tetangga yang kompleks dari sejak perkembangan sejarah China. Barulah pada abad kesembilan belas, batas-batas China ditetapkan dan konsep China sebagai negara bangsa dikembangkan. Sebelumnya, masyarakat China menanggapi diri mereka sebagai penguasa “all under heaven” (Chinasage, “*China’s Neighbors*”). Sementara kedekatan historis dapat diamati dari pola interaksi perdagangan yang telah terjalin sejak lama saat masa *Silk Road*.

Ketulusan merupakan aspek penting dalam memperoleh mitra kerja dan menjaga hubungan baik. Ketulusan bertujuan untuk mendapatkan kepercayaan dari negara lain, sehingga kerjasama dapat terjalin dalam jangka panjang. Xi Jinping menekankan takdir bersama sebagai negara berkembang hendaknya membawa negara-negara pada pola hubungan yang tulus saling membantu untuk kesejahteraan bersama. Hal tersebut akan dituangkan dalam prioritas kerjasama China terhadap negara-negara berkembang (Swaine, 2015: 4).

Selain ketulusan, China perlu melakukan kerja sama dengan negara-negara tetangga berdasarkan asas saling menguntungkan, menciptakan jaringan yang lebih dekat untuk kepentingan bersama, dan membawa kepentingan konvergen ke tingkat yang lebih tinggi. China menegaskan bahwa negaranya tidak akan merugikan negara lain, sesuai dengan prinsip politik luar negeri China, atau yang sering dikenal dengan *win-win cooperation* (Swaine, 2015). Seperti pembangunan jalur

kereta api di Kenya yang berasaskan pada *win-win cooperation*.

Proyek jalur kereta api tersebut menuai kritik yang menyatakan bahwa proyek pembangunan tersebut merupakan bentuk kolonialisme baru yang dilakukan oleh China. Meskipun begitu, dalam wawancara CGTN dengan Prof. Peter Kagwanja, seorang peneliti dari Institusi Kebijakan Afrika, dan Dr. He Wenping, seorang Guru Besar dari Universitas Renmin, keduanya menolak asumsi kolonialisme baru yang dilontarkan oleh para kritikus politik. Peter menyatakan bahwa kerjasama Afrika dan China dalam proyek Madaraka Express merupakan bukti bahwa hal tersebut bukanlah kolonialisme baru. China secara tulus bekerjasama dalam prinsip persahabatan dan *win-win cooperation* (CGTN Africa, “*Community of Common Destiny: Neo-Colonialism: What has China Done in Africa*”, 20 September 2017).

Hal yang sama disampaikan oleh He Wenping yang mengatakan bahwa ini murni sebuah pertemanan antara China dan Afrika yang berprinsip pada *win-win cooperatiion*. Ia menambahkan bahwa *win-win cooperation* merupakan prinsip kebijakan luar negeri China yang memiliki tujuan akhir untuk membiarkan negara berkembang dengan kemampuannya secara mandiri. China hanya membantu perkembangan negara dengan *shared idea* dan pembangunan infrastruktur. China memiliki pengalaman yang lebih banyak dan lebih dulu dari Afrika, sehingga China bermaksud untuk membagi pengetahuan dengan Afrika, dan bukan kolonialisme baru (CGTN Africa, “*Community of Common Destiny: Neo-Colonialism: What has China Done in Africa*”, 20 September 2017).

Kemudian aspek penting selanjutnya adalah inklusivitas. dengan menggarisbawahi pentingnya inklusivitas, Xi Jinping menekankan promosi kerjasama regional dalam kawasan Asia Pasifik dengan antusiasme



yang lebih besar. China sendiri harus merangkul dan mempraktikkan gagasan ini sehingga dapat menjadi kepercayaan bersama dan norma perilaku untuk keseluruhan wilayah (Embassy of the People's Republic of China in the Republic of Suriname, “*Xi Jinping: Let the Sense of Community of Common Destiny Take Deep Root in Neighbouring Countries*”, 25 Oktober 2013). Kawasan Asia Pasifik memiliki sejarah yang dekat dengan negara China, serta mayoritas negara berkembang. Oleh karena itu, China mudah mendekati negara-negara tersebut dengan pendekatan kultural untuk membangun sinergitas kerjasama.

Pada tahun 2013, artikel lain di media pemerintah mengaitkan gagasan Mimpi China dengan slogan “*Shared Destiny*”, yang menggambarkan Mimpi China sendiri sebagai *Community of Common Destiny* (berbeda dari Mimpi Amerika tentang kebebasan individu). Menurut sebuah artikel sebelumnya yang diterbitkan oleh Xinhua, *community of common destiny* adalah sebuah komunitas “di mana kepentingan bangsa dan negara, serta kepentingan masing-masing dan setiap orang menjadi terkait erat, sehingga ketika orang didorong untuk mewujudkan cita-cita mereka sendiri, mereka juga menciptakan kondisi agar orang lain bisa mewujudkan cita-citanya”.

Formulasi<sup>5</sup> *community of common destiny* adalah hasil pemikiran pemimpin Partai Komunis China dan para ahli teori partai yang menulis pidatonya. Formulasi tersebut sengaja dibuat samar-samar dan berputar-putar agar sesuai dengan berbagai situasi. Frasa seperti “menghubungkan masa depan dan takdir pribadi seseorang dengan masa depan dan takdir bangsa dan negara” adalah rangkaian kata yang dirancang untuk pengulangan, seperti sebuah janji atau mantra kesetiaan

---

<sup>5</sup> Formulasi disebut *tifa* atau formula yang benar untuk ekspresi konsep politik atau ideologi utama.

intelektual (Barmé, Jaivin, & Goldkorn, 2014: 150). Sehingga, secara tidak langsung terintegrasi dalam pemikiran masyarakat maupun negara lain untuk mencapai tujuan China membentuk *community of common destiny* sebagai pengikat negara secara nilai.

## 2. Interpretasi terhadap Mimpi China tentang Kebangkitan Besar Bangsa China

*Community of common destiny* memiliki fokus pada lima aspek prioritas China dalam hubungan luar negeri yang sering disebut sebagai interpretasi dari Mimpi China—yang sedikit banyak berdasarkan pada nilai dan budaya China—, yaitu:

### 1) *Peaceful Development*

Pembangunan damai jangka panjang adalah ciri utama garis kebijakan luar negeri China sejak reformasi. Xi Jinping kembali menegaskan pandangan ini dalam beberapa pidato yang ditemukan dalam karyanya yang berjudul “*The Governance of China*”. Ia menambahkan unsur lain yang menguatkan pembangunan damai yaitu komitmen China untuk tidak mencari hegemoni atau melakukan tindakan ekspansi apapun, tidak pernah mencari keuntungan atas kerugian negara lain, menegakkan sistem perdagangan internasional dan berpartisipasi dalam tata kelola ekonomi global, menekankan kerjasama yang saling menguntungkan dan stabilitas global (Gov.cn, “*Full Text: China's Peaceful Development*”, 06 September 2011).

### 2) *New Model of Major-Country Relations*

Pola hubungan baru dengan negara besar ini ditunjukkan untuk tiga negara yaitu Rusia, Amerika Serikat, dan Eropa. China menyerukan negara-negara tersebut untuk membangun kerjasama berdasarkan tiga aspek utama yaitu “no conflict or confrontation”, “mutual respect”, dan “win-win cooperation”. Aspek pertama bertujuan untuk membangun kerjasama yang

damai tanpa menimbulkan konflik bersenjata yang dapat merugikan kedua negara. Aspek kedua merupakan prinsip dasar dari pola hubungan tersebut dengan menghormati perbedaan masing-masing untuk menciptakan satu pemahaman bersama dan non-intervensi. Aspek ketiga merupakan perilaku yang wajib ditunjukkan oleh kedua negara demi menjaga kelangsungan kerjasama yang saling menguntungkan (Minseon, 2015: 24).

### 3) *Neighborhood Diplomacy*

Dalam menjalin hubungan dengan negara-negara tetangga, China menerapkan kebijakan luar negeri lama yaitu tidak mencampuri urusan dalam negeri, menghindari dominasi terhadap urusan regional, koordinasi kebijakan dan hubungan ekonomi yang lebih baik, menghormati keragaman regional, penolakan terhadap model pembangunan “one-size-fits-all”, dan penyelesaian sengketa melalui “equal-based dialogue and friendly consultation”. *Neighborhood Diplomacy* bertujuan untuk mempromosikan perdamaian, stabilitas, dan pembangunan. China mendefinisikan negara tetangga secara luas, yaitu negara-negara yang terletak di sebelah Timur Pegunungan Ural, Selat Bosphorus dan Terusan Suez, kemudian di sebelah Selatan Pegunungan Kaukasus, dan sebelah Barat Laut Bering. Terdapat total 62 negara yang menjadi tetangga China. Hal itu menyiratkan bahwa China tidak dapat melakukan diplomasi yang sama terhadap seluruh negara tersebut. Sehingga, China perlu menyortir 62 negara tetangganya, kemudian menentukan tingkat, kekuatan, pola, dan bidang kebijakan diplomasi terhadap negara-negara tersebut (The Diplomat, “*A Blueprint for China’s Neighborhood Diplomacy*”, 30 Maret 2016).

4) *Cooperation with Developing Countries*

Kerjasama dengan negara berkembang merupakan tema besar *community of common destiny*. Salah satu kerjasama yang dibangun adalah *One Belt and One Road* (OBOR) dengan prinsip penerimaan terhadap keragaman jalur politik, ekonomi, dan pembangunan sosial, anti hegemonisme dan pro kesetaraan antarbangsa. Selanjutnya, prinsip yang digunakan merupakan prinsip dasar politik luar negeri China yang didasarkan pada nilai dan budaya China yaitu persahabatan, saling menghormati, kesetaraan, tidak mengintervensi, dan inklusivitas (Swaine, 2015).

5) *Multilateral Relations*

China berupaya untuk meningkatkan hubungan multilateral dengan negara-negara khususnya kawasan Asia. Dalam *Conference on Interaction and Confidence-Building Measures in Asia* (CICA) pada tanggal 21 Mei 2014, Xi Jinping menegaskan pentingnya menjaga stabilitas keamanan, dan membangun “common destiny” antara negara-negara sebagai dasar dalam menjalankan kerjasama regional. Merujuk pada hal tersebut, Xi Jinping mengingatkan kembali pada pembentukan OBOR sebagai wujud dari hubungan multilateral antarnegara berkembang (Swaine, 2015).

### 3. **Geostrategis dengan memanfaatkan globalisasi**

Perkembangan globalisasi yang menciptakan tatanan dunia baru dimanfaatkan oleh negara untuk mencapai kepentingan. Globalisasi menciptakan *borderless* sehingga hubungan antarnegara menjadi kabur dan negara lain akan mudah mengintervensi urusan dalam negeri. Batas negara menjadi kabur akibat penetapan kebijakan secara kolektif yang tidak lagi memperhitungkan batas negara (Ceglowski, 1998). Semakin berkembangnya globalisasi, kebijakan negara pun terlihat semakin mendukung *borderless* seperti visa schengen di Uni

Eropa, kebijakan negara-negara bebas visa, dan kerjasama perdagangan bebas.

Globalisasi membawa isu domestik menjadi isu internasional, begitupun sebaliknya, isu internasional menjadi isu domestik (Held, McGrew, Goldblatt, & Perraton, 1999). Isu yang diangkat tidak hanya isu politik tinggi (seperti konflik, keamanan, terorisme, dan lainnya) tetapi juga isu politik rendah (seperti kemiskinan, perubahan cuaca, air, dan lainnya). Sehingga tujuan akhir globalisasi membuat negara terintegrasi menjadi satu kesatuan yang besar.

Oleh karena itu, China memanfaatkan momentum globalisasi untuk mencapai Mimpi China melalui kebijakan *community of common destiny*. Ide dari kebijakan tersebut yaitu menjadikan negara-negara terintegrasi satu sama lain dalam satu pemahaman bersama. Momen tersebut dimanfaatkan China untuk mengintegrasikan negara-negara menjadi satu kesatuan yang saling terhubung. Seperti mengembalikan pola lama China “semua satu di bawah langit”, yang artinya negara saling terhubung satu sama lain, dengan takdir yang sama dan masa depan yang sama. Sistem berbagi berlaku dalam kebijakan ini (Barmé, 2014).

Strategi China untuk memenuhi kebijakan tersebut dilakukan melalui diplomasi dengan negara-negara tetangga. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, China berbatasan darat dengan 14 negara. Negara-negara perbatasan tersebut menjadi fokus utama diplomasi China. China memanfaatkan letak geografis yang strategis untuk mencapai Mimpi China melalui kebijakan *community of common destiny*.

Namun, China memiliki pemahaman standar ganda terhadap globalisasi. Pada satu sisi, China melihat globalisasi sebagai alat untuk mewujudkan Mimpi China. Di sisi lain, China menolak perkembangan globalisasi yang semakin masif dengan prinsip dan nilai Barat.